

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam buku *Cuba: A Short History* (Bethell, 1993), Amerika Serikat memiliki hubungan yang erat dengan Kuba yang mengatasnamakan keadilan akan kedaulatan berbangsa dan bernegara pada abad 18-an. Kedekatan hubungan ini dibuktikan dari perananan serta keikutsertaan Amerika Serikat mengembalikan kedaulatan Kuba secara menyeluruh dalam perang kemerdekaan Kuba dari Spanyol. Untuk pertama kalinya di daratan benua Amerika tepatnya di negara Kuba, Christopher Colombus seorang pelaut yang berbangsa Eropa mengunjungi daratan tersebut pada 28 Oktober 1492 sekaligus melakukan intifada dan berujung pada invasi secara besar-besaran.

Kuba memiliki letak penempatan strategis serta keuntungan tersendiri di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Kuba memiliki satu dari sekian banyak akses masuk bagi negara luar yang memiliki keinginan untuk menjelajah lebih dalam di daratan Amerika Latin dan sekitarnya. Fakta ini yang menyebabkan Amerika Serikat memberikan perhatian lebih terhadap Kuba sebagai jalur masuk akan masuknya negara lain yang mencoba mendarat dan mencari keuntungan di daratan Amerika. Rasa cemas yang timbul akibat ancaman akan terganggunya ketentraman regional tersebut membuat animo Amerika Serikat terpacu. Pada tanggal 20 Mei 1902 dalam perang besar perlawanan terhadap Spanyol, Amerika Serikat ikut terlibat dan memenangkan perang di Havana yang berujung pada kembalinya kemerdekaan dan kedaulatan di Kuba (Siboro, 2012, hal. 35).

Pasca Kuba merdeka, diplomat revolusi Kuba Tomas Estrada Palma membalas jasa dengan perjanjian

memberikan hak intervensi dalam negeri Kuba dalam bantuan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat dalam perang mengembalikan kedaulatan Kuba, seperti yang tertera dalam The Platt Amandement poin III:

“III. That the government of Cuba consents that the United States may exercise the right to intervene for the preservation of Cuban independence, the maintenance of a government adequate for the protection of life, property, and individual liberty, and for discharging the obligations with the respect to Cuba imposed by the treaty of Paris on the United States, now to be assumed and undertaken by the government of Cuba.” (The Platt Amandemen, 1776-1949)

Perjanjian tersebut adalah syarat prasyarat yang diberikan Amerika Serikat terhadap Kuba atas bantuannya yang telah membantu mendapatkan kemerdekaan Kuba. Didalam syarat tersebut pemerintah Kuba telah menyetujui perjanjian tersebut demi kelangsungan kedaulatan Kuba. Salah satu syarat tersebut berbunyi memperbolehkan melakukan intervensi dalam negeri Kuba dengan maksud menjaga kedaulatan Kuba agar tercipta rezim yang memiliki akuntabilitas dan kapabilitas yang mumpuni serta memiliki tujuan menjaga segala hak kerakyatan berbangsa dan bernegara dari setiap rakyat (Morris, 1956, hal. 144-145).

Dari bantuan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat selama perang, terjalinlah hubungan baik antara Amerika Serikat – Kuba dengan memberikan bantuan penuh terhadap Kuba sebagai negara yang baru merdeka. Di sektor ekonomi dan perdagangan, Amerika Serikat menjadikan Kuba sebagai salah satu lahan investasi terbesar kedua setelah perjanjian Amandemen Platt tersebut diberlakukan karena di

dalamnya terdapat regulasi pengurangan besar cukai yang masuk terhadap produk ekspor yang dimiliki Amerika Serikat dan memonopoli pasar dalam negeri Kuba (Brenner, 1988, p. 9). Walau situasi tersebut terdengar sangat buruk dan telah merugikan politik ekonomi dalam negeri Kuba, akan tetapi Tomas melanjutkan penerapan sistem seperti yang tertera dalam perjanjian The Amandemen Platt supaya Amerika Serikat terus memberikan integritas secara penuh.

Beberapa tahun kemudian terjadi kudeta di Kuba yang diprakarsai oleh Fulgencio Batista dalam menggulingkan pemerintahan Gerardo Machado pada tahun 1933. Kejadian tersebut tidak membuat Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan intervensi tanpa alasan yang pada akhirnya menandakan Fulgencio menguasai Kuba menurut kehendaknya (Bethell, 1993).

Keberlanjutan perjalanan idealisme Kuba berbelok arah pada tahun 1959 yang disebabkan pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dengan menggunakan strategi gerilyanya yang mendorong terjadinya revolusi besar di Kuba dan berhasil menggulingkan rezim Fulgencio sekaligus menjadikan Fidel Castro pemimpin revolusioner yang baru. Dibawah pemerintahannya, pada tahun 1959 polemik hubungan diplomatik Amerika Serikat – Kuba perlahan semakin memburuk diawali dengan keputusan Fidel Castro dalam mengambil alih aset dalam negeri yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Fidel memberikan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat untuk tidak lagi ikut campur urusan dalam negeri Kuba perihal semua kebijakan yang banyak mengandung unsur eksploitasi, serta intervensi yang dilakukan Amerika Serikat di Kuba setelah membantu kemerdekaan hanyalah membuat situasi dalam negeri Kuba semakin bergejolak (Nuriyanah, 2016, hal. 2).

Setelah Kuba dibawah pimpinan Fidel, Fidel melakukan kerjasama hubungan bilateral dengan Uni Soviet lebih intens yang berdampak pada hubungan Amerika

Serikat – Kuba karena merasa adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Kuba di sisi lain Uni Soviet sendiri adalah musuh bebuyutan sejak lama dan bertentangan dengan ideologi Amerika Serikat. Kebijakan Kuba yang berlawanan arah ini pada tahun 1960 akhirnya membuat Presiden Eisenhower memutuskan untuk membuat kebijakan politik luar negeri embargo ekonomi berupa larangan perdagangan ke Kuba dan denda bagi perusahaan dari Amerika Serikat dan melarang negara dunia ketiga yang memiliki hutang, bekerjasama dengan Kuba (Diamond, 2015). Adanya embargo ini melarang adanya kerjasama antara pemerintah ataupun korporasi Amerika Serikat dengan Kuba dalam semua aspek ekonomi dan bisnis termasuk didalamnya terdapat larangan perjalanan (*restriction*) dari Amerika Serikat ke Kuba maupun sebaliknya (Lee & Bride, th). Tindakan yang dilakukan Amerika Serikat ini menjadi indikasi awal putusnya hubungan diplomatik dengan Kuba. Pemutusan hubungan bilateral tersebut antara Amerika Serikat – Kuba beserta kebijakan embargo yang diterapkan di masa Presiden Eisenhower memiliki dampak yang cukup signifikan di politik dalam negeri Amerika Serikat. Terlihat dahulu mobilitas ekonomi Amerika Serikat sangat bergairah akan tetapi pasca terputusnya hubungan dengan Kuba, komoditas datang Amerika Serikat yang dulu di ekspor ke Kuba mengalami kemunduran. Kebijakan tersebut juga memiliki dampak terhadap pasokan bahan pangan dan obat-obatan ke Kuba yang mayoritas sebelumnya disuplai oleh Amerika Serikat.

Pasca terjadinya pemutusan hubungan bilateral kedua negara, Amerika Serikat dan Kuba tak pernah lepas dari gejala kepentingan masing-masing terlebih ketika Presiden John F. Kennedy mengambil kepala estafet kepemimpinan di Amerika Serikat dengan semakin ketatnya embargo ekonomi. Di lain sisi, terdapat catatan setidaknya lima kali uji coba pembunuhan Fidel Castro yang dilakukan Amerika Serikat antara tahun 1961-63 untuk menggulingkan rezim

tersebut, beberapa diantaranya adalah melalui invasi teluk babi dan operasi Mongoose (Suddath, 2009).

Ketegangan hubungan Amerika Serikat – Kuba memuncak ketika pada bulan Oktober 1962 mengalami insiden besar yang dikenal dengan sebutan “*Cuban Missile Crisis*”. Awal mula terjadinya peristiwa itu adalah sewaktu pesawat mata-mata Amerika Serikat melaporkan adanya aktivitas pembangunan instalasi senjata nuklir yang dilakukan oleh Uni Soviet di Kuba. Kemudian, Presiden Kennedy berhasil menggagalkan pembangunan tersebut karena dapat berpotensi memunculkan perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung selama 13 hari (Donaldson, 2000). Setelah terjadi perundingan penarikan kedua pangkalan nuklir tersebut, negara-negara dunia ketiga yang bekerjasama dengan Amerika Serikat didesak agar tidak menjalin kerjasama bilateral dengan Kuba dalam bentuk apapun. Pengaruh kebijakan ini dimaksudkan terjadi penekanan lebih dalam agar pada rezim Fidel Castro terjadi reformasi secara konstitusi dan membuat pembaharuan demokratis di Kuba. Sampai di bulan Oktober tahun 1992, kongres Amerika Serikat sempat mengesahkan *Cuban Democratic Act* yang melarang cabang perusahaan Amerika Serikat yang bermarkas di luar negeri untuk tidak melakukan perdagangan ke Kuba, bepergian ke Kuba dan pengiriman uang ke Kuba. Hal ini menetapkan bahwa setiap kapal yang telah mengirim barang atau memberikan layanan untuk Kuba tak diperkenankan merapat kembali ke pelabuhan Amerika Serikat selama 180 hari (Priambodo, 2017).

55 tahun lamanya yang penuh dengan situasi panas yang rentan akan terjadinya dinamika lebih buruk antara Amerika Serikat dengan Kuba, pada tanggal 17 Desember 2014 presiden Amerika Serikat, Barrack Obama mengumumkan bahwa akan ada rencana untuk memperbaiki hubungan bilateral yang sebelumnya penuh dengan stigma dilema yang tiada henti (Lee & Bride, th). Ternyata

pernyataan yang sama pula disampaikan oleh presiden Kuba yang baru Raul Castro yang merupakan adik kandung dari Fidel Castro (Daniel, 2011, hal. 104). Pernyataan tersebut dibuktikan ketika pertemuan Barrack Obama dan Raul Castro pada bulan April 2015 yang menjadi pertemuan Perdana bagi kedua negara pasca 55 tahun terakhir lamanya pemutusan hubungan diplomatik. Tindak lanjut dari normalisasi hubungan ini dilanjutkan dengan berbagai kesepakatan antar kedua negara. Amerika Serikat dan Kuba sepakat untuk melakukan *prisoner swap* dimana Amerika Serikat dan Kuba saling melepaskan tawanan politik mereka. Pada tanggal 20 Juli 2015 akhirnya kedua negara membuka kedutaan besar di masing-masing ibukota, yakni Washington DC dan Havana, sebagai penanda akan pemulihan hubungan diplomatik kedua negara secara penuh (Diamond, 2015).

Biarpun segala upaya normalisasi hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Kuba telah melewati berbagai gejolak dinamika, akan tetapi pemulihan hubungan diplomatik tersebut tidak diikuti dengan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Terlebih dengan melihat fakta bahwa Kuba tidak akan melakukan normalisasi tersebut secara penuh dengan Amerika Serikat tanpa adanya pencabutan embargo ekonomi tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Kuba Raul Castro melalui Menteri Luar Negeri Kuba :

“Embargo that has caused damages and hardships to the Cuban people and affects the interests of American citizens must be lifted and the territory occupied by the U.S. naval base in Guantanamo should be returned to Cuba,” - Bruno Rodríguez Parilla, Cuban Foreign Affairs Minister (Abdullah, 2015)

Pasang surutnya kepastian akan normalisasi penuh hingga pencabutan embargo oleh Amerika Serikat hanya menjadi wacana belaka hingga pemerintahan Barack Obama berakhir sehingga semua hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui mengapa sikap atau kebijakan Amerika Serikat terhadap Kuba masih tetap memberlakukan embargo ekonomi meski Kuba sudah merubah konstelasi politik ekonomi di dalam negerinya.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menjawab mengapa Amerika Serikat tetap menjalankan kebijakan embargo ekonomi terhadap Kuba pada tahun 2014-2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang muncul adalah : “Meskipun Kuba telah mengalami reformasi politik ekonomi, mengapa Amerika Serikat masih tetap menjalankan embargo ekonomi terhadap Kuba?”

D. Kerangka Pemikiran

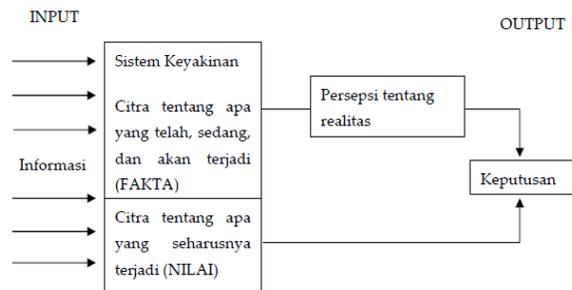
Agar bisa menjawab rumusan masalah secara mendalam, maka penulisan skripsi ini akan menggunakan satu jenis teori dan satu tipologi, yaitu: teori persepsi, tipologi strategi politik luar negeri dari pemikiran John Level:

1. Teori Persepsi

Dari berbagai teori politik luar negeri yang memiliki sifat teoritis mikro, teori ini mengambil teori persepsi yang dicetuskan oleh Ole R. Holsti sebagai analisa guna mengetahui permasalahan dalam tulisan ini. Berkaitan antara hubungan citra, persepsi dan perilaku internasional, terdapat penjelasan bahwa pada awalnya dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri terjadi masalah atau suatu kondisi tertentu. Tiga hal

pertama yang harus dilakukan para pembuat kebijakan adalah menanggapi masalah tersebut yang meliputi (Mas'oeed, 1991):

- a) Terdapat semacam pemicu dari lingkungan.
- b) Adanya upaya untuk mempersiapkan stimulus tersebut yang diterapkan oleh pembuat kebijakan untuk menilai informasi yang masuk.
- c) Adanya upaya akan penafsiran informasi yang telah dipersepsikan. Hasil dari persepsi ini sangat mempengaruhi pada citra atau gambaran yang terdapat dalam benak pembuat kebijakan.



Bagan 1.1. Holsti (dalam Russet & Starr, dikutip oleh Mas'oeed, 1991:21).

Dalam pandangannya, terdapat tiga aspek mendasar dalam persepsi, antara lain nilai, keyakinan dan pengetahuan akan fakta yang telah terjadi. Berbagai tahapan yang terstruktur dipaparkan oleh Russet dan Starr telah dikembangkan oleh Ole dalam suatu diagram runtut yang menggambarkan persepsi dan relevansinya terhadap citra dan sistem keyakinan. Sistem keyakinan terbagi menjadi serangkaian citra sehingga membentuk kumpulan kerangka dasar dari sudut pandang seseorang atau seorang pembuat kebijakan. Citra tersebut terdiri dari realitas lampau,

sekarang dan diharapkan menjadi realitas masa depan (Holsti, 1985, hal. 304).

Pada bagan diatas dapat disimpulkan bahwa pada awalnya seseorang mendapatkan informasi. Kemudian informasi yang diterima tersebut mensinergikan kedalam keyakinan yang dianutnya. Adanya keyakinan tersebut berasal dari fakta yakni citra mengenai apa yang telah, sedang atau akan terjadi, sedangkan nilai yakni citra mengenai apa yang seharusnya terjadi. Seseorang tersebut memiliki persepsi realitas melalui beberapa fakta yang telah terjadi yang pada akhirnya mendorong untuk mengambil keputusan yang relevan. Sehingga, dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri perlu untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang yang mengambil keputusan tersebut dipengaruhi oleh keyakinannya sendiri.

Dalam kasus ini, perombakan konstelasi politik ekonomi yang terjadi di Kuba yang dipimpin oleh Raul Castro sedikit mengalami pergeseran, terbukti dengan gaya *low-politic* yang dimiliki Raul berbeda dengan gaya berpolitik Fidel yang *high-politic* dan terlalu mencolok. Keterbukaan dimata global yang dilakukan oleh Raul lebih memperlihatkan bahwa konstitusi Kuba telah dibenahi lebih baik. Pada pemerintahannya sempat mengutarakan ingin memperbaiki hubungan bilateral dengan Amerika Serikat sama halnya dengan Barrack Obama yang ternyata ingin memperbaiki juga.

Di satu sisi, Pandangan Barrack Obama mengenai pengaruh Uni Soviet di Kuba mengalami penurunan serta inisiasi dalam reformasi pemerintahan di Kuba akan kebijakan sosialisme yang ditaburkan dengan kapitalisme didalamnya menjadikan warna baru di pemerintahan Kuba (Polansky, 2011). Hal tersebut merubah kondisi tatanan perpolitikan Kuba yang memiliki implikasi terhadap kebijakan luar negeri

Amerika Serikat, salah satunya memberikan kesempatan Amerika Serikat mengekspansi liberalisme di Kuba.

Menurut Obama, Kuba adalah negara kecil, negara miskin yang tidak menimbulkan ancaman nyata bagi Amerika Serikat terlebih lagi di era internet dan pergerakan kapital global, keterbukaan yang dilakukan Raul adalah agen perubahan yang lebih hebat daripada *independent* (DeYoung K. , 2016). Di sisi lain, badan legislatif Komisi Hubungan Internasional sebagai perwakilan *House of Senate* yang dalam prakteknya memiliki andil dalam mengambil keputusan urusan luar negeri memiliki persepsi berbeda dari Obama. Komisi Hubungan Internasional menilai bahwa idealisme sosialisme yang diterapkan di Kuba tidak mengalami pergeseran, hanya dalam beberapa hal saja. Gejala perubahan warna baru pemerintahan ala Raul Castro tersebut hanya bersifat sementara dan tidak konstan yang memiliki arti arah perpolitikan di Kuba masih sama seperti dulu.

Komisi Hubungan Internasional menilai bahwa kebijakan yang tepat dalam menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat adalah tetap mempertahankan embargo ekonominya.

Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut, Obama dan Komisi Hubungan Internasional terlibat dalam kebijakan manakah yang harus diambil. Diantara dua hasil persepsi tersebut Komisi Hubungan Internasional memiliki tawaran yang pengaruhnya lebih rasional daripada Obama. Alhasil, adaptasi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba adalah rekomendasi yang diusulkan oleh Komisi Hubungan Internasional Senat Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya.

2. Tipologi Strategi Politik Luar Negeri

Tipologi memiliki tujuan membuat skema yang tertib untuk mengklasifikasikan serta mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi. Teori ini dikemukakan oleh John Lovell (Mas'oeed, 1990, hal. 188) dalam tipologi strategi politik luar negeri berpatokan pada argumen bahwa kebijakan luar negeri dari suatu negara merupakan hasil dari para pembuat kebijakan terkait strategi lawan dan prakiraan mereka akan kapabilitas mereka sendiri. Pada pembagian tipologi ini, suatu negara akan membuat cara untuk melakukan strategi politik luar negeri tertentu berdasarkan pertimbangan yang berimbang antara perkiraan kemampuan mereka dan perkiraan strategi lawan dengan sedemikian rupa. Kemudian, teori ini memperkecil strategi politik luar negeri suatu negara kedalam empat tipologi yang dari setiap aspek memiliki titik temu antara situasi tertentu dengan perkiraan kemampuan diri dan perkiraan strategi lawan dari para pembuat kebijakan tersebut.

		penilaian tentang strategi lawan	
		mengancam	mendukung
perkiraan kemampuan sendiri	lebih kuat	konfrontasi	memimpin
	lebih lemah	akomodasi	konkordan

Bagan 1.2. John Lovell, "Foreign Policy in Perspective" karya Mochtar Mas'oeed, Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LPP3ES, 1990, hal. 190.

Pada bagan diatas, dapat disimpul tipologi ini berusaha untuk menjelaskan bahwa produk strategi politik luar negeri suatu negara merupakan hasil dari kalkulasi menurut *cost and benefit* terhadap bagaimana penilaian kemampuan pada dirinya sendiri yang berpengaruh dalam mengambil berbagai pilihan strategi politik luar negeri yang akan diambil. Pengaruh ini juga diperoleh dari berbagai perspektif negara

tersebut yang berdasarkan pada informasi yang telah didapatkan dalam melihat kemampuan maupun strategi lawan, yang pada akhirnya akan berimplikasi pula terhadap pilihan strategi politik luar negeri yang dihasilkan.

Pada fokus teori ini, teologi strategi politik luar negeri berfokus pada kalkulasi *cost and benefit* yang mana negara tersebut mengambil keputusan terbaik dan meminimalisir resiko kemungkinan terburuk dari pengaruh politik luar negeri lawan. Pada suatu ketika suatu negara memposisikan dirinya lebih lemah dari lawan dan dianggap mempunyai potensi strategis yang lebih komprehensif akan konsekuensi dari suatu kebijakan, maka strategi politik luar negeri yang akan diambil adalah tipologi akomodasi karena strategi tersebut memiliki potensi dampak kerugian yang minim. Sebaliknya, ketika negara tersebut ingin mengambil strategi politik konfrontatif maka negara tersebut harus memiliki power lebih daripada lawan karena hal ini akan berdampak pada dinamika politik suatu negara yang berdampak secara fatal. Dalam hal ini pengaruh dari penggunaan *costs and benefits analysis* ikut mengambil bagian besar dalam pembuatan keputusan strategi politik luar negeri suatu negara.

Tipologi ini adalah sebagai salah satu alat pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam mengatasi politik luar negeri Kuba yang diterapkan. Korelasi teori ini dengan fenomena yang akan diteliti menjelaskan bahwa pada kepemimpinan Barack Obama mengambil tindakan yang lebih kooperatif terhadap Kuba terbukti dengan janji kampanye presidennya yang akan membuka kembali hubungan diplomatik dengan Kuba yang notabene memiliki sejarah simpang siur. Obama menilai dengan adanya kerjasama diantara negara-negara di kawasan Amerika akan menghasilkan kapabilitas yang lebih

kuat. Dengan membujuk negara lain agar memiliki paham yang serupa, dengan dalih kerjasama Amerika Serikat dapat memimpin regional Amerika

Kuba dibawah roda pemerintahan Raul Castro perlahan semakin memperlihatkan eksistensi demokrasi dalam menjalankan konstitusi. Terlihat ketika rakyat Kuba tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan secara keseluruhan, tetapi juga dapat mengekspresikan pendapat, ide dan gagasan dari setiap individu. Demokrasi yang mulai terlihat di Kuba yaitu dengan adanya pemilihan umum terbuka dan banyaknya golongan yang telah membahas masalah HAM yang terjadi di Kuba. Walaupun Kuba adalah negara dengan sistem partai tunggal, tetapi pemilihan umum juga tetap diberlakukan.

Dalam ranah global, Kuba kembali mengikuti organisasi internasional salah satunya OAS (*Organization of American States*) setelah dicabut suspensinya pada tahun 2009 (Daniel, 2011, hal. 105). OAS adalah organisasi negara-negara benua Amerika yang memiliki power yang kuat di Benua Amerika. Selama masa pemerintahan Fidel Castro, Kuba tidak berpartisipasi kedalam organisasi tersebut selama kurang lebih 47 tahun, tetapi dengan adanya reformasi yang dibuat oleh Raul Castro, Kuba diperbolehkan berpartisipasi dalam OAS.

Masuknya daftar keanggotaan Kuba dalam OAS membuat sedikit pergeseran yang terjadi di Kuba salah satunya keterbukaan politik dimata global. Kuba percaya bahwa kesetaraan negara dan respon positif negara di belahan bumi Amerika yang terjalin dalam OAS sangat bagus seperti yang dikutip dalam wawancara delegasi Kuba dalam OAS, "*Well the altitude of the fellow delegates is very good. Most of them especially of Latin American States Central*

America States and Caribbean States showed that they want Cuba reproach OAS” (Aydinian, 2016). Meskipun hanya sebagai partisipan pasif terhadap kebijakan regional, pandangan Kuba terhadap keikutsertaannya ke OAS adalah salah satunya untuk melihat progresivitas regional. Hal ini membuktikan bahwa Kuba mengalami pergeseran dalam menjalankan konstitusi sistem demokrasinya.

Berdasarkan paparan diatas, telah terbukti bahwa Kuba antara tahun 2014-2016 mengalami pergeseran idealisme yang mana mempengaruhi sikap negara lain terhadapnya yang memiliki paham yang serupa sama tidak terkecuali Amerika Serikat sendiri.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sikap Amerika Serikat terhadap reformasi politik ekonomi di Kuba antara tahun 2014-2016 tetap menjalankan embargo karena terdapat perbedaan persepsi antara eksekutif dengan legislatif didalam konstitusi Amerika Serikat dan berakhir dengan kemenangan usulan dari legislatif karena memiliki tingkat rasional yang lebih tinggi sehingga kebijakan konfrontasi embargo terhadap Kuba harus tetap dilakukan. Dengan hasilnya, adaptasi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba adalah rekomendasi yang diusulkan oleh Komisi Hubungan Internasional Senat Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya.

F. Metodologi Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode eksplanatif guna melakukan pembahasan secara mendalam dan menyeluruh. Penyusunan skripsi ini juga menggunakan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data, yaitu:

1. Library Research

Pengumpulan data pendukung yang berasal dari buku maupun jurnal yang sekiranya dapat memperkuat penjelasan masalah.

2. Media Research

Pengumpulan data tambahan melalui berita di media cetak maupun berita di internet yang dapat mendukung penjelasan yang dipaparkan.

3. Analisa Data

Proses analisa seluruh data yang telah dikumpulkan guna disesuaikan kecocokannya dengan permasalahan yang akan dibahas untuk kemudian disusun sebagai suatu penjelasan yang utuh.

G. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan masalah mengenai “*sikap Amerika Serikat terhadap reformasi politik ekonomi Kuba*” tidak terlalu luas, maka pembahasan topik permasalahan ini dibatasi pada fakta yang telah terjadi dalam rentan waktu 2014-2016.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan topik skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi fokus masalah, tujuan penelitian skripsi ini, rumusan masalah yang harus dijawab, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, dan praduga awal mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada. Selain itu, bab I juga memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, jangkauan

penelitian dan pengelompokan materi penulisan skripsi.

BAB II : DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DENGAN KUBA

Bab ini menjelaskan tentang sejarah serta dinamika sikap Amerika Serikat terhadap reformasi politik dan ekonomi yang terjadi di Kuba sebelum dan sesudah reformasi.

BAB III: TRANSISI KIRI : KONSTELASI POLITIK DAN REFORMASI EKONOMI KUBA PADA MASA PEMERINTAHAN RAUL CASTRO

Bab ini menjelaskan tentang perubahan tatanan bentuk politik ekonomi Kuba yang dipertimbangkan oleh persepsi Barrack Obama dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat serta pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik dengan Kuba.

BAB IV : STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM MENGATASI PEMBAHARUAN KONSTELASI EKONOMI POLITIK KUBA

Bab ini membahas mengenai alasan Amerika Serikat untuk tetap memberlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba meskipun reformasi yang terjadi di Kuba mengalami progres yang signifikan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian masalah yang dikaji.